

**PERAN APARATUR DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
PEMUDA DI DESA PADANG DALAM NGARAS  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Lela Widdiawati**

**NPM. 2113032022**



**PENDIDIKAN PANCASILAN DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

**PERAN APARATUR DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK  
PEMUDA DI DESA PADANG DALAM NGARAS  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Oleh :**

**Lela Widdiawati**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**PENDIDIKAN PANCASILAN DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERAN APARATUR DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMUDA DI DESA PADANG DALAM NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Oleh**

**Lela Widdiawati**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis peran aparatur desa dalam menyelesaikan konflik pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penulisan ini yakni pemuda Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Sampel dalam penulisan ini berjumlah 74 responden. Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan uji regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penulisan menunjukkan bahwa aparatur desa berperan dalam menyelesaikan konflik pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dengan presentase sebesar 55,4%. Hal ini dapat di lihat dari peran aparatur desa yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan, membina kerukunan dan ketentraman, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Penyelesaian konflik pemuda yang dapat dilakukan oleh aparatur desa yakni mediasi konflik, fasilitas pertemuan pemuda, pemberian sanksi, dan penyediaan solusi. Menciptakan ruang bagi pemuda untuk berdiskusi secara terbuka dapat membantu meredakan ketegangan. Dialog yang konstruktif bisa mengarah pada pemahaman dan solusi bersama. Menyediakan layanan konseling atau dukungan psikologis bagi pemuda yang mengalami kesulitan emosional, secara aktif memantau kondisi sosial di desa untuk mendeteksi potensi konflik lebih awal dan mengambil langkah pencegahan sebelum masalah berkembang.

***Kata kunci: Aparatur Desa, Konflik, Pemuda, Masyarakat***

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN RESOLVING YOUTH CONFLICTS IN PADANG VILLAGE IN NGARAS PESISIR BARAT DISTRICT**

**By**

**Lela Widdiawati**

*The purpose of this writing is to analyze the role of village officials in resolving youth conflicts in Padang Dalam Ngaras Village, Pesisir Barat Regency. The writing method used in this writing is a descriptive method with a quantitative approach. The subject of this writing is the youth of Padang Dalam Ngaras Village, Pesisir Barat Regency. The sample in this writing amounted to 74 respondents. The data analysis technique in this writing uses a simple linear regression test with the help of SPSS. The results show that village officials play a role in resolving youth conflicts in Padang Dalam Ngaras Village, Pesisir Barat Regency with a percentage of 55.4%. This can be seen from the role of village officials, namely in providing services in the government sector, fostering harmony and tranquility, and increasing community participation. Resolving youth conflicts that can be carried out by village officials includes conflict mediation, youth meeting facilities, providing sanctions, and providing solutions. Creating a space for young people to discuss openly can help ease tensions. Constructive dialogue can lead to mutual understanding and solutions. Providing counseling services or psychological support for youth experiencing emotional difficulties, actively maintaining social conditions in the village to detect potential conflicts early and take preventative steps before problems develop.*

**Keywords: Village Apparatus, Conflict, Youth, Community**

Judul Skripsi : **PERAN APARATUR DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEMUDA DI DESA PADANG DALAM NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT**

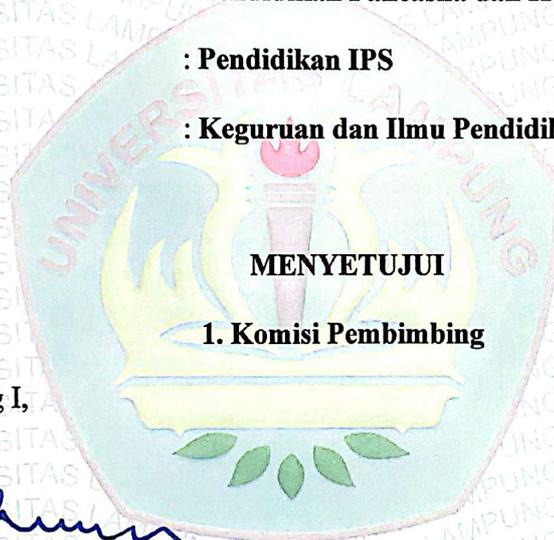
Nama Mahasiswa : **Tela Widdiawati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2113032022**

Program studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Berchah Pitoewas, M.H**  
NIP. 19611214 199303 1 001

**Nurhayati, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 231804920708201

**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn

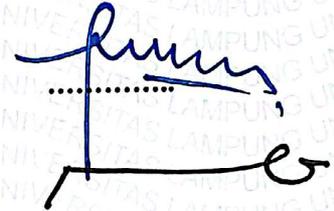
**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP. 19741108 200501 1 003

**Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.**  
NIP. 19870602 200812 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

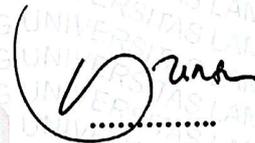
**Ketua : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



**Sekretaris : Nurhayati, S.Pd., M.Pd.**

.....

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.**



**2. Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Dr. Rizwandi, M.Pd.**  
9760808200912 1 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Lela Widdiawati  
NPM : 2113032022  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Dusun III, RT/RW 001/001, Desa Padang Dalam  
Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat,  
Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 17 Januari 2025



*Lela Widdiawati*  
Lela Widdiawati  
NPM. 2113032022

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lela Widdiawati, Penulis lahir di desa Negeri Ratu Ngaras, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat tepat pada tanggal 01 Juli 2003. Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Hermansyah dan Amida.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 1 Negeri Ratu Ngaras (lulus pada tahun 2015). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah (lulus pada tahun 2018). Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pesisir Tengah (lulus pada tahun 2021). Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Lampung dan tercatat sebagai mahasiswi Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN.

Penulis semasa kuliah pernah mengikuti organisasi Anggota BEM U, HIMAPIS, DPM U, PMMI. Anggota Divisi Minat Dan Bakat Forum Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung (Fordika) periode 2022, Anggota Divisi PSDM Forum Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung (Fordika) periode 2023 Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Bali-Malang-Jogjakarta pada tahun 2023.

Melaksanakan salah satu mata kuliah wajib yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Taman Sari Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Serta penulis melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SDN 2 Taman sari.

## **MOTTO**

“Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi”. - Andrea Hirata

“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”. – B. J. Habibie

“Teruslah bermimpi, karna semuanya berawal dari mimpi sampai mimpi itu menjadi kenyataan.”

(Lela Widdiawati)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirobil aalamin,*

Puji syukur kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Besar, Rabb yang menguatkan hati, pikiran, perjuangan sehingga penulis dapat mempersembahkan karya ini sebagai tanda kasih sayang kepada:

Kedua orang tuaku tersayang (Bapak Hermansyah dan Ibu Amida) yang telah menjadi orang tua yang terbaik untukku dan menjadi salah satu alasan untukku terus berjuang sampai akhir ini. Terima kasih untuk semua doa-doa yang dibisikkan setiap malam, dukungan yang selalu diberikan, dan kasih sayang yang tak terhingga selama proses penulis menyelesaikan studi. Segala kemudahan yang aku dapatkan aku percaya dibalik itu semua ada doa-doa yang selalu dibisikkan di bumi namun terdengar dilangit sehingga Yang Maha Besar mengabulkannya.

Penulis selalu melangitkan doa-doa juga semoga kedua orang tuaku panjang umur, sehat selalu sampai maut memisahkan, penulis sembahkan gelar ini nanti untuk mereka yang selalu mendukung apapun jalan yang penulis ambil di jalan yang baik untuk masa depan penulis.

Segala perjuangan penulis hingga titik ini aku persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup aku. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita dari pada diri kita sendiri.

Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

“Teruntuk almamaterku tercinta, Universitas Lampung”

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Di Desa Padang Ngaras Dalam Kabupaten Pesisir Barat**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan yang datang, baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka segala hambatan tersebut dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd. Selaku Plt. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sekaligus selaku Pembahas I terimakasih atas ilmu, arahan, dukungan serta saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, ilmu, arahan, dan dukungan serta saran dan masukannya selama ini kepada penulis, yang sangat memotivasi penulis untuk cepat dan tidak lelet dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Ibu Nurhayati. S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus selaku Pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan ilmu, bimbingan, dan arahnya selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II, terimakasih atas ilmu, arahan, dukungan serta saran dan masukannya selama ini.
9. Bapak, Ibu Dosen dan Staf program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan, motivasi dan semangat serta bantuan yang juga selalu diberikan.
10. Kepada yang tak akan pernah terlupakan orang tua penulis adiku yogi kurniawansyah dan mei diana sari, terimakasih atas motivasi kalian sehingga bisa membuat penulis penuh semangat untuk cepat menyelesaikan perkuliahan ini gelar ini aku persembahkan untuk gelar S.Pd pertama di keluarga penulis.
11. Kepada seseorang yang tak kalah suport dari keluarga ku salah satu mahasiswa kampus umitra angkatan 18 terimakasih atas motivasinya, bimbingan, dan masukan kepada penulis selama dalam proses penulis dalam perkuliahan sampai mengerjakan skripsi ini.
12. Bapak Sarmada selaku kepala desa desa padang dalam ngaras terima kasih banyak telah memberikan izin penulisi untuk melakukan penelitian di desa padang dalam ini.
13. kepada teman-teman dan saudaraku yang bernama, via, maya, wo lia, rosa, puspa, terimakasih penulis ucapkan selama penulis kuliah dan khususnya mengerjakan skripsi ini penulis merasa sangat dihibur di saat penulis pusing kalian bisa membuat penulis melupakan kepusingan itu.
14. Kepada yang bernama Salsabila Farah Fajrah Yang biasa saya panggil bila, Terimakasih banyak mungkin saya ucapkan kepada Allah telah menemukan kamu dalam hidup penulis, menjadi teman dan saudara baru penulis di dunia

perkuliahan ini, mungkin jika dituliskan di swacana ini tidak cukup 3 halaman untuk menulis kan tentang nama ini, teruslah berproses anak pertama, punggung kita sudah di latih untuk kuat demi keluarga kita, terimakasih atas bantuan dan suport kamu disaat penulis menulis skripsi ini, ayok terus melangkah penulis tunggu kesuksesan kamu yang selalu kamu ceritakan kepada penulis untuk dikemudian hari nanti.

15. Kepada sevira dan viola terimakasih banyak juga penulis ucapkan kalian telah menjadi teman baik penulis di masa perkuliahan, salah satu nikmat dari allah penulis bisa ditemukan teman sebaik kalian, terimakasih atas bantuan dan suport kalian di saat kita bersama, tetap kuat dan sehat selalu sampai kapanpun sukses.
16. Kepada teman-teman Angkatan 2021 yang tak bisa penulis tulis satu persatu, terimakasih kalian sudah menemani perjalanan perkuliahan penulis, dari maba sampai selesai.
17. Kepaa teman-teman KKN desa taman sari terimakasih penulis ucapkan atas suport dan dukungan kalian disaat penulis menulis skripsi ini.
18. Kepada keluarga besar ku dari pihak ayah dan ibu terimakasih atas dukungan dan suport kalian penguat penulis di masa perkuliahan yang membuat penulis semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
19. Kepada diriku sendiri Lela widdiawati penulis ucapkan terimakasih tak terhingga karna bisa kuat di saat banyaknya cobaan yang dateng disaat memulai perkuliahan hingga menulis skripsi ini, teruslah melangkah dan semangat karna selesainya perkuliahan ini awal dari masa depan yang akan di jalankan di hari esok.

Bandar Lampung, 17 Januari 2025

**Penulis,**

**Lela Widdiawati  
NPM. 2113032022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya yang sangat berlimpah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan konflik Pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis ini menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan bagi penulis. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan di masa mendatang dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat serta semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 17 Januari 2025

**Penulis,**

**Lela Widdiawati**  
**NPM. 2113032022**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>COVER JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Kegunaan Penulisan .....	7
1. Kegunaan Teoritis .....	7
2. Kegunaan Praktis .....	8
G. Ruang Lingkup Penulisan .....	9
1. Ruang Lingkup Ilmu .....	9
2. Ruang Lingkup Objek Penulisan .....	9
3. Ruang Linkup Subjek Penulisan .....	9
4. Ruang Lingkup Tempat Penulisan .....	9
5. Ruang Lingkup Waktu Penulisan .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Deskripsi Teori .....	10
1. Tinjauan Umum Peran Aparatur Desa .....	10
1) Pengertian Aparatur Desa .....	10
2) Tugas Pemerintah Desa .....	11
3) Kewenangan Dan Kewajiban Kepala Desa Dan Aparatur Desa .....	16
4) Indikator Peran Aparatur Desa .....	17

2. Tinjauan Umum Konflik Pemuda .....	18
1) Pengertian Konflik .....	18
2) Pengertian pemuda .....	21
3) Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pemuda.....	23
4) Strategi dan Pendekatan dalam Mengatasi Konflik .....	24
5) Hambatan dan Peran Pendukung dalam Penyelesaian Konflik .....	27
6) Indikator Penyelesaian Konflik Pemuda .....	29
B. Penulisan Terdahulu Yang Relevan.....	33
C. Kerangka Pikir .....	34
D. Hipotesis.....	35
<b>III. METODOLOGI PENULISAN .....</b>	<b>36</b>
A. Metode Penulisan .....	36
B. Populasi dan Sampel .....	36
1. Populasi.....	36
2. Sampel.....	37
C. Variabel Penulisan.....	39
1. Variabel Bebas.....	39
2. Variabel Terikat .....	39
D. Definisi Konseptual dan Operasional.....	40
1. Definisi Konseptual.....	40
2. Definisi Operasional.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
1. Teknik Pokok .....	41
2. Teknik Penunjang.....	42
F. Instrumen Penulisan.....	43
1. Lembar Angket.....	43
2. Lembar Wawancara.....	43
G. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	43
1. Uji Validitas.....	43
2. Uji Reliabilitas .....	45
H. Teknik Analisis Data .....	46
1. Analisis Distribusi Frekuensi .....	46
2. Uji Prasyarat Analisis.....	47
1) Uji Normalitas.....	48
2) Uji Linearitas.....	48
3. Analisis Data .....	49
1) Uji Hipotesis .....	49
2) Uji Regesi Sederhana .....	50
3) Uji Koefisien Determinasi .....	50
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Langkah-Langkah Penulisan.....	52
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	52
2. Penulisan Pendahuluan.....	52
3. Pengajuan Rencana Penulisan.....	53
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data .....	53

5. Pelaksanaan Uji Coba Penulisan.....	53
B. Gambaran Umum dan Lokasi Penulisan.....	58
1. Sejarah Desa Padang Dalam Kecamatan Ngaras .....	58
2. Kondisi Geografis .....	59
3. Kondisi Demografis .....	60
4. Kondisi Ekonomi .....	60
5. Kondisi Keagamaan .....	60
6. Kondisi Pendidikan .....	61
7. Kondisi Sosial Budaya .....	62
C. Deskripsi Data Penulisan .....	62
1. Pengumpulan Data .....	62
2. Penyajian Data .....	63
D. Analisis Data Aparatur Desa (X) dan Konflik Pemuda (Y).....	81
1. Uji Prasyarat.....	81
1) Uji Normalitas.....	81
2) Uji Linearitas.....	82
2. Uji Hipotesis .....	83
1) Uji Regresi Linier Sederhana .....	83
2) Uji Koefisien Determinasi .....	84
E. Pembahasan Hasil Penulisan.....	84
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	106

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kerangka Pikir .....	35
4.1 Grafik Distribusi Frekuensi Indikator Penyelenggara Pelayanan Di Bidang Pemerintahan .....	65
4.2 Grafik Distribusi Frekuensi Indikator Membina Kerukunan Dan Ketentraman .....	67
4.3 Grafik Distribusi Frekuensi Indikator Meningkatkan Partisipasi Masyarakat .....	69
4.4 Grafik Distribusi Frekuensi Variabel X (Aparatur Desa).....	71
4.5 Grafik Distribusi Frekuensi Indikator Mediasi Konflik.....	73
4.6 Grafik Distribusi Frekuensi Indikator Fasilitas Pertemuan Pemuda.....	75
4.7 Grafik Distribusi Frekuensi Indikator Pemberian Sanksi .....	77
4.8 Grafik Distribusi Frekuensi Indikator Penyediaan Solusi.....	78
4.9 Grafik Distribusi Frekuensi Variabel Y (Konflik Pemuda).....	80

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Tabel Populasi Usia Pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras .....	37
3.1 Tabel Sample Usia Pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras .....	39
3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas .....	45
3.4 Tabel Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi .....	51
4.1 Tabel Uji Coba Angket Variabel X .....	55
4.2 Tabel Uji Coba Angket Variabel Y .....	55
4.3 Tabel Uji Reliabilitas Variabel X .....	57
4.4 Tabel Uji Reliabilitas Variabel Y .....	57
4.5 Tabel Jumlah Penduduk Per Dusun .....	60
4.6 Tabel Data Penduduk Yang Bekerja .....	60
4.7 Tabel Data Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	61
4.8 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Penyelenggara Pelayanan Di Bidang Pemerintahan .....	64
4.9 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Membina Kerukunan Dan Ketentraman .....	66
4.10 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Meningkatkan Partisipasi Masyarakat .....	68
4.11 Tabel Distribusi Frekuensi Aparatur Desa .....	70
4.12 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Mediasi Konflik .....	72
4.13 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Fasilitas Pertemuan Pemuda .....	74
4.14 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Pemberian Sanksi .....	76
4.15 Tabel Distribusi Frekuensi Indikator Penyediaan Solusi .....	78
4.16 Tabel Distribusi Frekuensi Konflik Pemuda .....	80
4.17 Tabel Uji Normalitas .....	81
4.18 Tabel Uji Linearitas .....	82
4.19. Tabel Uji Regresi Sederhana .....	83
4.20 Tabel Hasil Perhitungan R Kuadrat .....	84

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Izin Penulisan

Lampiran 2 Tabulasi Data Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 3 Hasil Angket Kepada 74 Responden

Lampiran 4 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel X (Aparatur Desa)

Lampiran 5 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Y (Konflik Pemuda)

Lampiran 6 Kisi-Kisi Instrumen Angket Penulisan dan Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi Penulisan

Lampiran 8 Hasil Analisis Data

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional. Sebagai ujung tombak pemerintahan, desa tidak hanya bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial masyarakatnya. Setiap desa tentunya memiliki struktur pemerintahannya, dalam konteks ini pemerintah desa dan jajarannya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya aparat desa beserta jajarannya bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan dari peraturan pemerintahan yang termaktub dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang desa dalam melaksanakan urusan kemasyarakatan. Pemerintah desa dituntut lebih tanggap menyikapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi ditengah-tengah warganya, aparat desa mampu bersifat netral, dengan mengedepankan prinsip kebenaran, tanpa harus memihak. Sebagai aparat desa tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi, dari permasalahan kecil merambat kepermasalahan yang besar.

Aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, memiliki kewenangan dan tanggung jawab serta tugas dalam mengelola konflik di tingkat desa. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sementara itu, dari perspektif kebijakan publik, peran aparatur desa dalam menyelesaikan Konflik pemuda dapat dilihat sebagai implementasi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, kemampuan peran aparatur desa untuk menangani konflik pemuda menjadi salah satu ukuran keberhasilan implementasi kebijakan otonomi desa.

Peran aparatur desa dalam menyelesaikan konflik antar pemuda juga harus mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan. Meskipun pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sering menjadi pilihan utama dalam penyelesaian masalah di tingkat desa, aparatur desa juga harus memahami batas-batas kewenangan mereka dan kapan harus melibatkan pihak berwajib dalam kasus-kasus yang melanggar hukum. Karna menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pendekatan kultural dan penegakan hukum formal .

Penanganan yang dilakukan kepala desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Musyawarah dan mediasi sering menjadi metode utama dalam penyelesaian konflik di desa, namun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola permasalahan tersebut Wahyudi ( 2015). Selain itu, aparatur desa juga dituntut untuk mampu mengidentifikasi akar permasalahan dan mengembangkan strategi pencegahan.

Peran aparatur desa dalam konteks ini juga berkaitan erat dengan konsep modal sosial. Putnam., (2020) mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Dalam menyelesaikan konflik pemuda, aparatur desa padang dalam dituntut untuk dapat memobilisasi dan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat,

seperti kearifan lokal, gotong royong, dan sistem kekerabatan, sebagai instrumen dalam resolusi konflik.

Sebagai pelaksana roda pemerintahan di desa tentunya aparat desa memiliki banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Salah satu tantangan signifikan yang sering dihadapi oleh pemerintahan desa yaitu konflik antar pemuda. Permasalahan ini bukan hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga merambah ke wilayah pedesaan. Konflik antar pemuda dapat bersumber dari berbagai faktor, mulai dari kesalah pahaman pribadi, persaingan kelompok, hingga masalah-masalah sosial yang lebih kompleks seperti pengangguran dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi Kartono., ( 2017).

Pemuda ini suatu generasi penerus bangsa, sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat (Ishardino : 2019) bahwa pemuda merupakan lapisan eksponensial bangsa, yang berjumlah 40% dari jumlah seluruh bangsa Indonesia. Untuk menjadi pemuda penerus bangsa yang baik pemuda ini bisa meninggalkan perbuatan yang bisa merusak kehidupan mereka yang nantinya juga akan menyusahkan para elemen pemerintahan yang ada. Permasalahan para pemuda ini bukan terjadi di perkotaan saja tetapi sering terjadi juga di pedesaan, sehingga membuat masyarakat dan pemerintahan desa merasa terganggu dengan adanya permasalahan yang dibuat oleh para pemuda ini, karenanya aparat desa harus cepat untuk menanggapi permasalahan pemuda yang terjadi.

Berdasarkan hasil penulisan pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Desa Padang dalam, masalah yang sering muncul di desa ini salah satunya yaitu tentang Konflik pemuda,yang disebabkan oleh kesalah pahaman antar pemuda karna adanya masalah yang terjadi, permasalahan ini biasanya terjadi disaat adanya suatu acara,seperti acara pesta perkawinan, dan terjadi mabuk-mabukan dalam acara tersebut, serta permasalahan lainnya seperti kasus

pencurian yang sering muncul dan diselesaikan oleh aparat desa padang dalam. Permasalahan ini tentunya sering kali diselesaikan oleh aparat desa sebagai bentuk perannya dalam menyelesaikan permasalahan dan menciptakan lingkungan yang tertib. Permasalahan pemuda di desa padang dalam ini tergolong sering terjadi dan butuh penyelesaian oleh pihak ketiga sebagaimana dalam hal ini aparat desa melaksanakan peranannya dalam me-mediasi, memberikan himbauan, serta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk menertibkan pemuda di lingkungan masyarakat. Dalam proses penyelesaian nya aparat desa sering mengalami tantangan dalam menangani konflik yang terjadi antar pemuda dan permasalahan tersebut semakin lama menjadi semakin kompleks karena adanya faktor-faktor lokal yang unik. Misalnya, diketahui bahwa masyarakat di desa padang dalam ini memiliki komposisi penduduk yang beragam dari segi etnis dan agama.

Permasalahan yang telah diteliti penulis bahwasanya memang sangat penting peran aparat desa untuk menyelesaikan konflik antar pemuda di desa Padang Dalam. Dalam hal ini tentunya banyak tantangan dan proses yang dilakukan oleh aparat desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satunya tantangan yang di hadapi oleh aparat desa dalam mendamaikan kehidupan dimasyarakatnya tentunya dengan berbagai cara supaya tidak terjadi suatu pertikaian tersebut, konflik ini terjadi disebabkan adanya kenakalan remaja, sehingga aparat desa ini berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kepala desa padang dalam menjelaskan sebab konflik yang terjadi juga sering diakibatkan karna faktor perekonomian di desa padang dalam yang masih rendah. Situasi ini menciptakan kerentanan sosial yang dapat memicu konflik di kalangan pemuda. Oleh karena itu, aparat desa dituntut untuk tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi juga mengembangkan program-program pemberdayaan pemuda yang dapat meningkatkan kapabilitas pemuda di desa padang dalam.

Salah satu program pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat desa padang dalam untuk meningkatkan kapabilitas para pemudanya supaya tidak terjadi

suatu Konflik antara pemuda, aparaturnya desa padang dalam melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti kepolisian, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Untuk mengurangi suatu Konflik yang ada aparaturnya desa juga selalu memperhatikan dan mengayomi pemuda disetiap kesempatan yang ada dalam acara-acara yang diadakan supaya terciptanya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan rangkaian acara dan sportifitas. Penanganan Konflik yang efektif memerlukan pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam konteks desa padang dalam, kemampuan aparaturnya desa untuk membangun dan mengelola jaringan kerjasama ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penyelesaian Konflik antar pemuda.

Hasil wawancara penulisan pendahuluan yang dilakukan oleh penulis terhadap kepala desa padang dalam menyampaikan bahwasanya perlu diakui bahwa peran aparaturnya desa dalam menyelesaikan konflik pemuda bukan lah tanpa tantangan. Selain keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang telah disebutkan sebelumnya, aparaturnya desa juga sering menghadapi dilema etnis dalam proses penyelesaian konflik. Misalnya, bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan komunitas, atau bagaimana menangani kasus-kasus yang melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkonflik. Penulisan wijaya., (2020) menunjukkan bahwa aparaturnya desa sering menghadapi tekanan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian Konflik ini yang dapat mempengaruhi objektivitas dan efektivitas penanganan Konflik.

Berdasarkan data dari Kantor Desa Padang dalam, sebagai lokasi penulisan ini, desa tersebut telah mengalami beberapa kasus Konflik antar pemuda dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat setidaknya lima kasus konflik besar antar kelompok pemuda dalam tiga tahun terakhir. Kasus-kasus ini bervariasi dari perselisihan kecil hingga konfrontasi fisik yang melibatkan puluhan pemuda. Situasi ini tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Perselisihan pemuda ini biasa sering terjadi disaat ada suatu acara yang melibatkan banyak orang sehingga pemuda berkumpul diacara itu dan nantinya membuat keributan karna adanya selisih antar pemuda dalam

konteks desa padang dalam, oleh faktor-faktor lokal seperti ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam memahami dan mengevaluasi peran aparatur desa dalam menyelesaikan Konflik pemuda di desa padang dalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis bermaksud melakukan penulisan ini tujuan untuk menganalisis secara mendalam “ **Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda Di Desa Padang Dalam**”. Penulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana peran aparatur desa dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar pemuda, dan strategi-strategi yang digunakan oleh aparatur desa dalam penyelesaiannya, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran mereka dalam konteks desa padang dalam. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aparatur desa sebagai stekholder yang memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desanya dan pemahaman secara umum terhadap pemuda sebagai salah satu generasi yang akan menjadi faktor penguat dalam roda pemerintahan yang kedepannya tentu akan mendapatkan kesempatan untuk memegang kepemimpinan dalam pemerintahan di desanya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyelesaian Konflik pemuda oleh aparatur desa
2. Penyelesaian Konflik pemuda bukan hanya dilakukan aparatur saja tetapi di bantu oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan elemen pihak yang berwajib.
3. Kurangnya pemuda dalam memegang kepemimpinan pemerintahan di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat.
4. Perlu adanya pemberdayaan pemuda dalam kegiatan positif didesa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi masalah pada peran aparatur desa dalam menyelesaikan konflik pemuda di desa padang dalam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “bagaimana peran aparatur desa dalam menyelesaikan konflik pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat?”.

### **E. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran aparatur desa terhadap penyelesaian konflik pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat. Penulisan ini akan mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh aparatur desa, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari upaya mediasi yang dilakukan. Dengan memahami peran aparatur desa secara lebih mendalam, diharapkan penulisan ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian Konflik pemuda ini.

### **F. Kegunaan Penulisan**

#### **1. Secara Teoritis**

Penulisan ini memiliki kegunaan teoritis yang signifikan dalam bidang ilmu hukum. Secara khusus, penulisan ini memperkaya literatur akademis mengenai peran aparatur desa dalam menyelesaikan Konflik pemuda. Dengan mengkaji bagaimana aparatur desa di desa padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat menjalankan peran mereka. Penulisan ini dapat memberikan wawasan baru tentang teori-teori yang berkaitan dengan peran aparatur desa dalam menyelesaikan Konflik pemuda di tingkat desa ini. Selain itu, penulisan ini dapat menghasilkan model atau kerangka kerja baru yang dapat digunakan untuk memahami menyelesaikan masalah yang ada antar pemuda di desa padang dalam.

Dengan demikian, penulisan ini menjadi referensi penting bagi studi-studi lanjutan yang ingin mengeksplorasi topik serupa dalam konteks yang berbeda.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penulisan ini memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa. Temuan-temuan dari penulisan ini juga dapat membantu pemerintah daerah, khususnya di Kecamatan Ngaras dan Kabupaten Pesisir Barat, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan untuk mendukung peran aparat desa. Selain itu, penulis mengharapkan bagi pemuda yang ada di desa padang dalam untuk tidak membuat masalah lagi kedepannya sehingga tidak terjadinya pertikaian, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam penyelesaian Konflik ini terhadap pemuda di desa padang dalam. Manfaat secara praktis pada penulisan ini ialah :

### **a. Bagi Pemuda**

Khusus desa padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat ini, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman agar berkurangnya suatu masalah yang terjadi dan melihat adanya peran penting aparat desa dalam menangani masalah dalam masyarakatnya.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai panduan masyarakat dan khususnya pemuda di desa padang dalam dan desa-desa lainnya untuk meningkatkan hidup yang rukun dan damai tanpa adanya Konflik yang terjadi kedepannya.

### **c. Bagi Penulis**

Penulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penambahan pengetahuan dan pengalaman mengenai peran aparat desa dalam menyelesaikan pertikaian pemuda di desa padang dalam kecamatan ngaras kabupaten pesisir barat.

## **G. Ruang Lingkup Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penulisan ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya Pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian tentang pendidikan hukum dan kemasyarakatan.

### **2. Ruang Lingkup Objek Penulisan**

Ruang lingkup objek penulisan ini adalah peran aparatur desa terhadap penyelesaian Konflik pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat.

### **3. Ruang Lingkup Subjek Penulisan**

Subjek pada penulisan ini adalah pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten besisir barat.

### **4. Ruang Lingkup Tempat Penulisan**

Ruang lingkup tempat penulisan adalah desa padang dalam, kecamatan ngaras, kabupaten pesisir barat.

### **5. Ruang Lingkup waktu peneltian**

Pelaksanaan Penulisan ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat izin penulisan pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 04 Juli 2024 dengan Nomor: **5598/UN26.13/PN.01.00/2024**. Pelaksanaan penulisan dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penulisan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas Lampung pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan Nomor: **9202/UN.26.13/PN.01.00/2024** dan penulisan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Padang Dalam untuk melaksanakan penulisan hingga selesai sejak dikeluarkannya surat balasan penulisan oleh Kepala Desa Padang Dalam pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan Nomor: **131/78/VI.02.07/2024**.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teori**

Deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian dan menguraikan secara lengkap dari berbagai informasi yang aktual sehingga memperkuat penulisan.

#### **1. Tinjauan Umum Aparatur Desa**

##### **1) Pengertian Aparatur Desa**

Aparatur Desa sering disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang menyimpan catatan wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang diterbitkan untuk melaksanakan pasal 216 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa sendiri berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, segala yang dilakukan di Desa tersebut dikoordinir oleh Pemerintah Desa. Menurut Bayu Suryaningrat (2020) Pemerintah Desa adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, yaitu Pemerintahan Desa.

Desa adalah sebuah wilayah yang paling terendah yang dibawah pimpinan langsung oleh Camat dan organisasi pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan adanya Desa menjadi sumber utama dari yang diperlukan pemerintah adalah data, keterangan untuk menyusun membangun sebuah daerah yang otonom. Desa juga mampu menciptakan

suasana pelayanan, yang dapat membatukan masyarakat untuk melaksanakan urusan dalam membuat administrasi.

Menurut Suherman.U (2024) Desa harus dapat menyesuaikan yang menjadi kebutuhan masyarakatnya agar terjamin kehidupan masyarakat yang layak. Jika dilihat dari beberapa aspek bahwa desa itu memiliki wilayah yang dapat ditempati oleh penduduk yang banyak, untuk menunjang kebutuhan dari masyarakat setempat pemerintah desa harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai supaya hidupnya lebih layak dan terjamin dengan fasilitas yang cukup, dalam peraturan pemerintah tugas utama dari pemerintah desa itu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah desa adalah orang yang menjalankan tugas dari pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Camat. Iskandar, A.H. (2020).

Berdasarkan penjelasan diatas Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian aparat desa penulis dapat menyimpulkan bahwa Di dalam struktur pemerintahan desa Kepala Dusun memiliki posisi sebagai pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Wilayah Dusun, Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **2) Tugas Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan salah satu unsur penting dalam struktur pemerintahan yang memiliki fungsi krusial dalam melaksanakan pemerintahan umum di tingkat lokal. Menurut Putri azrika, (2024) Tugas pokok dari pemerintah desa mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, hingga penyelesaian sengketa di masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi tugas, kewajiban, serta tanggung jawab yang diembannya.

Dalam konteks pemerintahan lokal, pemerintah desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang berskala lokal. Menurut teori desentralisasi, keberadaan pemerintah desa memungkinkan adanya otonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk mengelola urusan mereka sendiri. Anajji.F.F,(2024) Teori ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat yang terkena dampak, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa sering kali berhadapan dengan berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas administratif yang terbatas, serta konflik antarwarga yang membutuhkan penyelesaian. Di sinilah peran pemerintah desa menjadi sangat vital, karena mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam hal administrasi dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori governance, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam rangka mencapai tujuan bersama dan mengatasi berbagai masalah sosial.

Berdasarkan penjelasan melihat tugas pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang berwenang secara langsung dalam memimpin desa, yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur, melayani serta menjaga hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat seperti ekonomi pertanian, perikanan, perdagangan, keamanan, ketertiban, sosial budaya kemasyarakatan serta keamanan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) 43 Tahun 2014 Menerangkan Fungsi dan Tanggung Jawab aparatur desa Pasal 26 ayat (2) UU 6/2014 dalam melaksanakan tugas - tugasnya Kepala Desa/Kepala Lingkungan memiliki Wewenang.

a. Tugas Kepala Desa

Adapun tugas kepala desa menurut Abel alwi,(2024) Tugas dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b) Membina kehidupan masyarakat Desa
- c) Membina perekonomian Desa
- d) Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat desa
- e) Mendamaikan masyarakat di Desa
- f) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum.

b. Tugas Aparatur Pemerintah Desa.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ahmadi, (2015). Aparatur pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, yang perannya tidak hanya administratif tetapi juga sosial dan kultural. Aparatur pemerintah desa merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Aparatur pemerintah desa terdiri dari berbagai unsur yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab spesifik. Mereka berfungsi sebagai eksekutor kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala desa dan sebagai pelaksana operasional dari berbagai program dan kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah desa. Unsur-unsur aparatur pemerintah desa ini biasanya meliputi sekretaris desa, yang bertanggung jawab dalam administrasi dan dokumentasi; kepala seksi, yang mengawasi bidang-bidang tertentu seperti pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat, serta kepala dusun atau kepala wilayah, yang mengelola administrasi dan kegiatan di tingkat dusun atau wilayah desa. Selain itu, terdapat juga staf administratif dan teknis yang mendukung operasional sehari-hari pemerintah desa. Setiap unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa layanan publik dapat disampaikan dengan efisien dan efektif kepada masyarakat desa.

Menurut pandangan Juru, N.A., (2021) teori organisasi, struktur aparatur pemerintah desa ini merupakan bentuk dari struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Struktur ini memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif, yang penting untuk mencapai tujuan bersama dalam pemerintahan desa. Keterlibatan dan koordinasi antar unsur aparatur pemerintah desa ini juga penting dalam memastikan bahwa program-program desa dapat diimplementasikan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

c. Tata Kerja

Dalam melaksanakan, kepala desa dan perangkat wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan adanya struktur dan fungsi pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehingga koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Artinya bahwa peraturan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan kerjasama. Para aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dikontrol oleh lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa maupun oleh setempat. Wiranta, A (2024).

Kartini, W. D (2017) menjelaskan manusia merupakan unsur dinamis dalam bertindak/berfungsi sebagai subyek penggerak roda dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah di pemerintahan daerah faktor utama adalah manusia. Manusia sebagai pelaksana pemerintahan ini dapat melihat dalam beberapa kelompok masing-masing adalah :

- a) Pemerintah daerah terdiri daerah
- b) Alat-alat pelengkap terdiri dari aparatur
- c) Rakyat biasa.

Anraini,A.(202) mengemukakan bahwa komponen merupakan komponen yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintah daerah yang kuat dan efektif dalam pengembangan di daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah pemerintah dapat membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Daerah dilihat dari sisi perbaikan kualitas pemerintah yang harus dimulai sejak rekrutmen dengan suatu sistem yang benar-benar menjamin penggunaan sumber daya yang memang memiliki kualitas dasar yang baik, pembinaan melalui penugasan pelatihan yang mendukung tersedianya tenaga-tenaga siap pakai, peningkatan kesejahteraan yang memadai, dan mempersembahkan jaminan hari secara nyata. Syafrilia,N.(2024)

Mengingat besarnya tugas pemerintah daerah maka kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia terutama Birokrasi di daerah harus ditingkatkan, karena saat ini kita sudah cukup tertinggal dari negaranegara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Daerah-daerah yang saat ini berjuang membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan sebagai organisasi pemerintahan sekaligus instrumen pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Sementara itu, pegawai-pegawai masih sulit untuk dihilangkan seperti, pegawai pada tugas-tugas, tumpang tindihnya tugas dan fungsi, rendahnya tugas dan lain sebagainya. Malau, M. T.(2014)

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari pengertian pemerintah desa inilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kinerja

pemerintah desa pada dasarnya adalah rencana-rencana yang disatukan dan dirancang pemerintah desa untuk memastikan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk memastikan proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien mencapai tujuan tertentu.

### 3) **Kewenangan dan Kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Menurut Hanif (2020) Kinerja kepala desa dalam rencana penulisan ini dilihat sebagai kinerja formal yang harus dilaksanakan oleh kepala desa yang melayani kepentingan publik desa, pengertian kinerja kepala desa dimaknai sebagai pelaksana tugas dan fungsi sesuai kewenangan kepala desa dalam pelayanan publik diperoleh atas perintah undang-undang.

Kepala desa memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memberi pelayanan, meningkatkan kualitas serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan tujuan otonomi, prinsip yang dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab, yang dimaksud adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan pelaksanaan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimaksud otonomi yang bertanggung jawab penyelenggaraannya harus benar-benar sesuai dengan tujuan dan tujuan pemberi otonomi pada dasarnya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama. Mina, R.(2016)

Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021) menjelaskan perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari pegawai negeri sipil. Sekretaris desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya, diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Perangkat desa juga memiliki tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai tugas, wewenang, hak dan kewajiban

kepala Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam Pasal 26 ayat (1),(2),(3) dan (4). Pasal 26 ayat (1) Mengatur tentang tugas Kepala Desa. Pasal 26 ayat (2) mengatur tentang kewenangan Kepala Desa. Pasal 26 ayat (3) mengatur tentang Hak Kepala Desa. Sedangkan Pasal 26 ayat (4) mengatur tentang kewajiban Kepala Desa.

#### **4) Indikator Peran Aparatur Desa**

Maswara, (2014) menjelaskan agar terwujudnya suatu tugas khusus dari pemerintah desa perlu adanya fungsi utama dari Pemerintah Administrasi Desa sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari anggota masyarakat.
- c. Membina kerukunan, ketentraman dan siapa saja bagi seluruh anggota masyarakat.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Keinginan yang harus terwujud dari sebuah pemerintahan Desa yaitu dapat menciptakan masyarakat yang mampu berpartisipasi baik dalam politik maupun pembangunan.

Berdasarkan menurut Permendagri nomor 6 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi perangkat desa yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi dan tugas aparatur desa penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator yang akan digunakan oleh penulis yaitu penyelenggaraan pelayanan dibidang pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, membina kerukunan dan ketentraman di masyarakat. Di dalam struktur pemerintahan desa kepala desa memiliki posisi sebagai pembantu kepala desa dan unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah desa, kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **2. Tinjauan Umum Konflik Pemuda**

### **1) Pengertian Konflik**

Menurut suci,R.A(2023) Konflik merupakan bentuk derivatif dari kata tikai, artinya beda atau selisih. Selanjutnya kata tersebut membentuk beberapa bentuk kata yang lain seperti bertikai dan Konflik. Konflik berarti perselisihan, perbedaan atau pertentangan paham dan sebagainya, pertengkaran dan percekocokan, yang bisa berkonsekuensi kepada tindakan perkelahian, pemukulan, pelukaan dan penganiayaan. Kata konflik juga dipahami sebagai terjemahan dari kata *dispute* (Inggris). Kata *dispute* sebagai terjemahan dari Konflik sama juga dengan istilah sengketa, namun begitu istilah sengketa justru diarahkan kepada sengketa perdata atau

muamalah. Ini yang membuat banyak ahli menggunakan istilah dispute sebagai sengketa, bukan Konflik dalam arti percekocan dan tindakan perkelahian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik dirumuskan sebagai percekocan; perselisihan; pertentangan; ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya).

Teori konflik yang di kemukakan oleh Karl Marx dimana teori ini menjelaskan konflik dalam pandangan karl marx merupakan suatu bentuk pertentangan kelas. Ia juga memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Masyarakat dilihat sebagai arena ketimpangan (*inequality*) yang mampu memicu konflik dan perubahan sosial. Marx melihat konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Konflik kelas timbul karena adanya pertentangan.

Konflik juga disebut dengan orang-orang yang berkonflik. Kata konflik berarti adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara parapihak. (Menurut audrey ruslijianto,2022), berpendapat bahwa Konflik/konflik dalam makna yang umum adalah perselisihan paham, sengketa, pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama.

Eri, M. (2023) menjelaskan konflik mengakibatkan hubungan tidak harmonis dan disosiatif, yaitu hubungan disosiatif merupakan hubungan atau relasi timbal balik yang bersifat negatif dan dapat mengakibatkan perpecahan. Bentuk-bentuk disosiatif antara lain pertentangan (konflik), kompetensi dan kontravensi. Khusus hubungan disosiatif pertentangan ini, tampak lebih mengarahkan pada hubungan konflik dan perpecahan. Secara definitif istilah pertentangan (konflik) merupakan jenis interaksi yang berbeda di antara persaingan dan juga kontravensi. Pertentangan ini ditandai dengan ketidakpastian terhadap diri seseorang, perasaan yang tidak suka atas orang lain yang diungkapkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan, sehingga berakibat kepada Konflik. Sementara hubungan

kontravensi adalah lebih disembunyikan dan kebencian kepada kepribadian seseorang, akan tetapi gejala-gejala tersebut tidak sampai Konflik dan pertentangan.

Kontravensi sebagai bentuk hubungan disosiatif konflik adalah terjadi dalam bentuk merintang atau menghalangi pihak lain dari tujuannya sehingga orang itu tidak mampu untuk mencapainya. Eri, M. (2023) Cara-cara kontravensi ini antara lain:

- a. Kasar dan halus, yaitu berupa proses yang kasar, vulgar, membuat suatu fitnah, provokasi, yang halus seperti memakai bahasa dan perilaku yang halus namun mengandung makna yang tajam.
- b. Terbuka dan tersembunyi, yaitu tindakan kontravensi itu datang secara terang-terangan dari pihak yang menentang. Adapun yang tersembunyi adalah sulit diketahui, secara visual hasil dari pekerjaan penentangan itu sudah tersebar, namun sulit dibuktikan dari mana asal penentangan itu.
- c. Resmi atau tidak resmi, yaitu sikap penentangan dengan cara-cara yaitu menggunakan jalur hukum ataupun konstitusional, sementara yang tidak resmi seperti dengan penggalangan massa, dengan cara-cara yang tidak dilembagakan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa istilah konflik memiliki beragam sinonim. Konflik dapat disamakan dengan percekcoan, pertengkaran, perkelahian, konflik dan sengketa. Untuk itu, dapat disimpulkan dalam rumusan baru bahwa konflik adalah suatu keadaan yang mengakibatkan relasi seseorang atau kelompok orang menjadi tidak harmonis atau disosiatif hingga pertentangan. Konflik merupakan keadaan hubungan antara masyarakat dan pemuda yang bersifat negatif yang berujung pada pertengkaran, serta konflik yang berkepanjangan sehingga menjadi masalah besar dalam kehidupan antar pemuda.

## 2) Pengertian Pemuda

Pemuda ini generasi penerus bangsa, sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Ishardino, (2019) bahwa pemuda merupakan lapisan eksponensial bangsa, yang berjumlah 40% dari jumlah seluruh bangsa Indonesia.

Pengertian pemuda di sini bila kita mengacu pada Rancangan Undang-Undang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Para pemuda ini memiliki beban untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa dari generasi sebelumnya. Tetapi jika dikaji secara mendalam tidak semua pemuda memiliki cita-cita luhur untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih maju. Masih banyak pemuda bangsa kita ini yang berbuat tidak sesuai dengan harapan generasi sebelumnya. Dapat dilihat bahwa banyak pemuda yang sekarang ini justru melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh suatu generasi harapan bangsa. Bahkan sekarang ini banyak pemuda yang justru merusak masa depan mereka sendiri. Beberapa persoalan yang memberikan bukti bahwa generasi pemuda saat ini bertindak melawan norma-norma yang ada, diantaranya ada sebagian pemuda yang senang mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, melakukan tindak kriminal seperti memperkosa, mencuri, mencopet bahkan merampok. Maka, hal ini merupakan tugas dari seluruh aspek masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan dan membentuk karakter pemuda.

Pemuda dijelaskan bahwa masyarakat ikut membentuk sarana atau wadah untuk para pemuda dalam mengembangkan minat dan bakatnya dalam hal apapun dalam rangka mencegah perilaku menyimpang yang sering kali terjadi di kalangan pemuda. Munajat, E. (2022) Sekarang ini banyak organisasi kepemudaan yang dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan nilai karakter pada pemuda. Contohnya seperti organisasi-

organisasi keagamaan seperti remaja masjid, ataupun organisasi lain seperti perkumpulan pemuda pecinta alam ataupun organisasi yang berdiri di suatu wilayah tertentu seperti di kecamatan, kelurahan ataupun RT seperti organisasi kepemudaan Karang Taruna.

Pemuda adalah tumpuan bangsa. Pemuda adalah generasi penerus perjuangan dan cita- cita bangsa. Dalam Undang- undang RI nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dijelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Amanah undang- undang ini mengisyaratkan bahwa titik penentu kemajuan bangsa dikendalikan oleh pemuda sekarang. Karena pada usia ini merupakan masa produktif pemuda dalam mengembangkan kreatifitas dan kemampuan. Dedikasi dan kemampuan pemuda sebagai generasi agen of change sangat penting peranannya. Sejarah mencatat, bukti kongkrit kontribusi pemuda untuk bangsa tercatat sejak tahun 1928 dimana tercetusnya Sumpah Pemuda sebagai ikrar tertinggi kemudian disusul dengan berkumandangnya Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Peran penting pemuda untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa diharapkan dapat bertahan hingga akhir zaman. Sebab akhir- akhir ini mulai marak pemberitaan mengenai perilaku menyimpang pemuda. Misalnya tindakakan kriminal, asusila, minum- minuman keras hingga sabu- sabu akhir- akhir ini banyak dilakukan oleh kaula muda. Pramusinto,A, dan kadiran. K,(2016)

Pemuda adalah tumpuan bangsa. Lahabu.I (2020) menjelaskan Sejarah membuktikan bahwa pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu negara ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif pemuda. Pemuda menjadi satu identitas potensial dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita- cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa. Keberadaan pemuda di Indonesia sesungguhnya dapat menjadi aset yang berharga bagi masa depan bangsa.

Berdasarkan penjelasan diatas Sebagaimana sesuai fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi dan informasi penulis di Desa padang dalam kabupaten pesisir barat banyak terjadi penyimpangan perilaku kaum para pemuda dari mulai terkecil sampai penyimpangan perilaku terbesar. Penyimpangan perilaku terkecil seperti kaum pemuda lebih senang menghabiskan waktu bermain gadget secara berlebihan, bermain game secara berlebihan daripada memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, emosional, hilangnya pengendalian diri, kurang control terhadap lingkungan sosial, bergadang membuat kebisingan, keluyuran. Sedangkan penyimpangan perilaku yang dianggap berat diantaranya terjadinya pergaulan bebas, menonton video porno, komunitas geng motor, sering terjadinya Konflik, kasus pencurian, tawuran pemuda antar warga, mabuk-mabukan, bahkan sampai terjadi kasus narkoba, seks bebas bahkan tidak jarang terjadi kehamilan di luar nikah.

### **3) Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pemuda**

Konflik atau konflik merupakan sebuah realitas sosial yang menyertai kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, haruslah senantiasa disadari bahwa keadaan masyarakat pasti ada ketegangan, percekocokan, atau perang. Konflik itu eksis dan hidup bersama kehidupan sosial masyarakat. Konflik/konflik yang terjadi di tengah masyarakat tentu tidak datang dan tidak terjadi dengan sendirinya. Konflik merupakan sebagai akibat dari berbagai penyebab yang melatarbelakanginya di awal. Dengan kata lain, muncul hubungan kausalitas antara sebab dan akibat atau aksi dan reaksi dalam masyarakat. Untuk itu, pada aspek ini terdapat banyak penyebab yang menjadi faktir yang mempengaruhi terjadinya Konflik. Alo liliweri (2018) menyebutkan bahwa di antara faktor terjadinya konflik dan Konflik dan pertentangan di tengah masyarakat terjadi karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya. Pada konteks ini, terdapat teori yang menunjukkan penyebab konflik dan Konflik di tengah masyarakat, antara lain:

- a. Teori hubungan masyarakat, memiliki pandangan bahwa Konflik yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat disebabkan polarisasi

yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda, perbedaan bisa dilatar belakangi SARA, bahkan pilihan ideologi politiknya.

- b. Teori identitas yang melihat bahwa konflik yang mengeras di masyarakat tidak lain disebabkan identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan.
- c. Teori kesalah pahaman antar budaya, teori ini melihat konflik disebabkan ketidakcocokan di dalam cara-cara berkomunikasi di antara budaya yang berbeda.
- d. Teori transformasi yang memfokuskan kepada penyebab terjadi konflik adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial-budaya dan ekonomi.

#### **4) Strategi dan Pendekatan dalam Mengatasi Konflik**

Mengatasi Konflik memerlukan pendekatan yang terstruktur dan bijaksana, serta strategi yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik Konflik yang dihadapi. Langkah pertama yang penting adalah mengidentifikasi sumber Konflik. Ini melibatkan analisis situasi untuk memahami latar belakang dan akar penyebab konflik Konflik, baik dari perspektif individu, kelompok, maupun organisasi. Selain itu, pemetaan kepentingan sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan kekhawatiran dari semua pihak yang terlibat. Dengan memahami semua aspek ini, kita bisa lebih mudah menemukan solusi yang adil dan memadai. Pendekatan yang terstruktur dimulai dengan analisis mendalam tentang faktor-faktor penyebab Konflik, yang dapat berupa ketidaksepakatan dalam tujuan, sumber daya, atau nilai-nilai yang berbeda. Pemahaman ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data yang komprehensif, yang kemudian diolah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mendasari konflik. Pemetaan kepentingan melibatkan identifikasi mendalam terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh setiap pihak, serta memahami kekhawatiran yang mungkin mempengaruhi sikap dan perilaku mereka.

Dengan memadukan analisis situasi dan pemetaan kepentingan, kita dapat menyusun strategi penyelesaian konflik yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengaddress akar penyebabnya, menciptakan solusi yang berkelanjutan dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Iswahyudi et al., (2023).

Strategi dan pendekatan dalam mengatasi Konflik ini memerlukan negosiasi dan mediasi juga merupakan strategi penting dalam penyelesaian konflik. Negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak melalui diskusi dan kompromi. Sementara itu, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yang bertindak sebagai fasilitator untuk membantu pihak yang berkonflik menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediator dapat membantu menjaga fokus diskusi pada isu-isu utama dan mengarahkan proses menuju resolusi yang konstruktif. Negosiasi dan mediasi memungkinkan adanya pertukaran pandangan yang lebih mendalam dan membuka peluang untuk menemukan titik temu yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Dalam negosiasi, semua pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumen dan mendengarkan perspektif lain, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan kesepakatan yang lebih solid. Mediasi, di sisi lain, menambahkan elemen netralitas yang dapat menenangkan ketegangan dan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk tetap fokus pada penyelesaian masalah. Seorang mediator yang terampil dapat mengenali dinamika kekuasaan dan emosi yang bermain, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dan terstruktur. Dengan demikian, baik negosiasi maupun mediasi tidak hanya membantu menyelesaikan konflik saat ini tetapi juga membangun fondasi bagi hubungan yang lebih sehat dan kolaboratif di masa depan (Jalil, 2014).

Abdul rohim (2017) menjelaskan strategi dan pendekatan mengatasi Konflik ini yaitu Pendekatan kolaboratif juga sangat efektif dalam mengatasi konflik. Dalam pendekatan ini, semua pihak diajak untuk

bekerja sama mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Sesi brainstorming bisa sangat bermanfaat dalam konteks ini, karena memungkinkan semua pihak untuk berkontribusi ide dan alternatif solusi. Kolaborasi bukan hanya membantu dalam menemukan solusi yang inovatif, tetapi juga memperkuat hubungan antara pihak yang berkonflik melalui kerja sama dan pemahaman bersama. Melalui pendekatan kolaboratif, pihak-pihak yang berkonflik diajak untuk berbagi pandangan dan keahlian mereka, yang sering kali menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi yang lebih komprehensif. Proses ini juga membangun rasa saling menghargai dan memperkuat kepercayaan di antara mereka, karena semua pihak merasa dilibatkan dan diakui kontribusinya. Ketika pihak-pihak bekerja sama menuju tujuan bersama, mereka juga mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang lebih baik, yang dapat mencegah terjadinya konflik di masa depan. Selain itu, dengan fokus pada kepentingan bersama daripada perbedaan, pendekatan kolaboratif mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap perspektif masing-masing pihak, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan kerja atau hubungan yang lebih harmonis dan produktif. Pendekatan ini juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim dan menghargai keberagaman dalam mencapai solusi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat (Abdurrahim, 2015).

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemecahan masalah merupakan inti dari penyelesaian konflik. Ini melibatkan analisis mendalam tentang masalah, menguraikannya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, dan mencari solusi untuk setiap komponen. Setelah berbagai alternatif solusi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi masing-masing alternatif untuk memilih solusi yang paling efektif dan adil. Proses ini memerlukan pemikiran kritis dan keterbukaan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif. Pada tahap analisis, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik dan memahami bagaimana setiap komponen berkontribusi terhadap keseluruhan masalah. Dengan mengurai masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita

dapat lebih mudah menargetkan akar penyebabnya dan mengembangkan solusi yang spesifik dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap identifikasi solusi, kreativitas dan kolaborasi sangat diperlukan untuk menghasilkan berbagai pilihan yang inovatif. Evaluasi setiap alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan dampak potensial, kelayakan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini harus transparan dan inklusif, memungkinkan semua pihak untuk memberikan masukan dan berbagi pandangan mereka.

#### **5) Hambatan dan Peran Pendukung dalam Penyelesaian Konflik**

Aparatur Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik di masyarakat. Mereka berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, memastikan bahwa Konflik/konflik diselesaikan secara damai dan adil. Dalam menjalankan tugas ini, aparatur desa menerapkan berbagai strategi dan pendekatan yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal dan karakteristik masyarakat setempat. Rofiq, A.,(2023) menjelaskan hambatan dalam Konflik pemuda ini biasanya dilakukan dengan Strategi yang digunakan oleh aparatur desa meliputi mediasi, negosiasi, dan pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka sering mengadakan pertemuan dan diskusi terbuka, di mana warga dapat menyampaikan keluhan dan mencari solusi bersama. Selain itu, aparatur desa juga melakukan pendekatan personal dengan mendatangi rumah-rumah warga yang terlibat konflik untuk memahami akar permasalahan secara lebih mendalam. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam meredakan ketegangan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Menjalankan peran mereka, aparatur desa dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu hambatan adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun anggaran. Aparatur desa sering kali harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, sehingga sulit untuk memberikan perhatian penuh terhadap setiap kasus konflik yang muncul.

Selain itu, adanya kepentingan pribadi dan politik juga dapat menghambat proses penyelesaian konflik, terutama jika pihak-pihak yang terlibat memiliki hubungan dekat dengan pejabat desa. Faktor sosial budaya dan kultural masyarakat juga memainkan peran penting dalam proses penyelesaian konflik, rohman, W.N., (2022). Masyarakat Padang Dalam Ngaras memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang sangat kuat, yang sering kali mempengaruhi cara mereka memandang dan menyelesaikan konflik. Misalnya, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat terhadap tetua desa sangat mempengaruhi pendekatan yang diambil dalam penyelesaian konflik. Aparatur desa harus memahami dan menghormati nilai-nilai ini agar dapat bekerja secara efektif.

Hambatan dan peran pendukung dalam penyelesaian Konflik menurut haziah T.(2020) hambatan kepentingan pribadi dan politik juga sering kali menjadi penghalang dalam proses penyelesaian konflik. Aparatur desa mungkin terlibat dalam konflik kepentingan jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki hubungan dekat dengan pejabat desa. Hal ini dapat menciptakan bias dalam proses mediasi dan penyelesaian, di mana keputusan yang diambil lebih mementingkan pihak tertentu daripada berfokus pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Intervensi politik lokal juga dapat mempengaruhi netralitas aparatur desa, terutama jika ada tekanan dari tokoh-tokoh berpengaruh yang ingin memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Keanekaragaman budaya di Kabupaten Pesisir Barat juga menambah kompleksitas dalam penyelesaian konflik. Aparatur desa harus mampu menavigasi berbagai pandangan dan kepercayaan yang berbeda untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan memiliki empati yang tinggi sangat penting dalam konteks ini. Secara keseluruhan, peran aparatur Desa Padang Dalam Ngaras dalam penyelesaian konflik sangat penting dan kompleks. Mereka harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan hambatan, serta

memahami dan menghormati faktor sosial budaya dan kultural masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis bagi seluruh warga desa.

#### **6) Indikator Penyelesaian Konflik Pemuda**

Yunus, A.S (2021) Menjelaskan penyelesaian penyelesaian Konflik pemuda ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu:

##### **a. Mediasi Konflik**

Mediasi konflik adalah proses di mana pihak ketiga yang netral, disebut mediator, membantu pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks Konflik pemuda. Langkah-langkah dalam mediasi konflik meliputi:

- a) Mengidentifikasi Masalah: Menggali akar penyebab konflik dari perspektif masing-masing pihak.
- b) Menciptakan Lingkungan Aman: Memastikan semua pihak merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi atau dihukum.
- c) Mendengarkan Secara Aktif: Mediator harus mendengarkan dengan seksama setiap pihak dan memahami kekhawatiran mereka.
- d) Mencari Solusi Bersama: Membantu pihak yang berkonflik menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

##### **b. Fasilitasi Pertemuan Pemuda**

Fasilitasi pertemuan pemuda melibatkan penyelenggaraan pertemuan yang bertujuan untuk membangun dialog dan pemahaman antar pemuda. Pertemuan ini bisa berbentuk diskusi kelompok, lokakarya, atau acara komunitas. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi:

- a) Menyusun Agenda Pertemuan: Menyusun topik yang relevan dan membahas isu-isu yang memicu konflik.
- b) Membangun Aturan Main: Menetapkan aturan untuk memastikan semua peserta dapat berbicara dan mendengarkan dengan hormat.

- c) Menggunakan Teknik Diskusi yang Efektif: Memanfaatkan teknik seperti brain storming atau debat terstruktur untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif.
  - d) Mendorong Kolaborasi: Menciptakan proyek atau kegiatan bersama yang mendorong kerjasama dan pemahaman.
- c. Pemberian Sanksi atau Tindakan Hukum
- Pemberian sanksi atau tindakan hukum dilakukan jika konflik sudah mencapai tahap yang membahayakan atau melanggar hukum. Langkah-langkahnya meliputi:
- a) Menetapkan Aturan yang Jelas: Menetapkan aturan tentang perilaku yang dapat diterima dan konsekuensi dari pelanggaran.
  - b) Melakukan Penyelidikan: Melakukan penyelidikan yang adil dan menyeluruh untuk memahami situasi dan bukti yang ada.
  - c) Menerapkan Sanksi yang Adil: Memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, skorsing, hingga tindakan hukum jika diperlukan.
  - d) Memberikan Kesempatan untuk Perbaikan: Menyediakan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki perilaku mereka melalui konseling atau program rehabilitasi.
- d. Penyediaan Solusi atau Alternatif Penyelesaian
- Menyediakan solusi atau alternatif penyelesaian berarti memberikan opsi-opsi yang dapat membantu menyelesaikan konflik tanpa harus berujung pada konfrontasi atau kekerasan. Beberapa cara untuk menyediakan solusi alternatif meliputi:
- a) Pelatihan Manajemen Konflik: Menyediakan pelatihan bagi pemuda untuk mengelola konflik dengan cara yang sehat dan konstruktif.
  - b) Program Pengembangan Diri: Menyediakan program yang membantu pemuda mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kepemimpinan.

- c) Membentuk Komite Penyelesaian Konflik: Membentuk kelompok yang terdiri dari anggota komunitas atau sekolah yang dilatih untuk menangani konflik dan menyediakan solusi.
- d) Mendukung Kegiatan Positif: Mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan yang membangun seperti olahraga, seni, atau proyek komunitas yang dapat mengalihkan perhatian mereka dari konflik.

Mengenai penyelesaian konflik menurut Abdul rohim., (2017) menjelaskan strategi dalam penyelesaian konflik ada 3 yaitu:

- a. Mediasi Mediasi: Upaya mediasi oleh pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, atau aparat pemerintah juga efektif dalam menyelesaikan konflik.
- b. Penyelesaian Masalah Menghindari Konflik: Menghindari konflik adalah salah satu strategi awal dalam menangani situasi yang potensial menjadi konflik. Menyelesaikan Masalah: Menyelesaikan masalah secara langsung dan terbuka dapat membantu menghilangkan sumber konflik dan mencegahnya kembali.
- c. Pemberian Sanksi Pemberian sanksi dilakukan jika konflik sudah mencapai tahap yang membahayakan yang bisa mengancam konflik yang terjadi.

Aldiano, H. N. (2019) menjelaskan bahwa penyelesaian konflik pemuda biasanya dilakukan dengan 3 tahap yaitu:

- a. Menyelesaikan Masalah Secara Tuntas Menyelesaikan masalah secara tuntas berarti mengatasi masalah dengan cara yang menyeluruh dan mendalam. Ini melibatkan pemahaman penuh terhadap masalah, identifikasi akar penyebabnya, dan penerapan solusi yang komprehensif. Proses ini memastikan bahwa semua aspek masalah diperhatikan dan solusi yang diterapkan benar-benar mengatasi penyebab utama, bukan hanya gejala. Dengan pendekatan ini,

diharapkan masalah tidak hanya teratasi sementara, tetapi juga tidak muncul kembali dimasa depan.

- b. Menggunakan Kepala Dingin dan Melakukan Diskusi Menggunakan kepala dingin dalam melakukan diskusi berarti mempertahankan ketenangan dan objektivitas saat menghadapi perbedaan pendapat atau situasi yang menegangkan. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, mengelola emosi, dan berpikir secara rasional. Dengan kepala dingin, seseorang dapat menghindari keputusan impulsif dan reaksi emosional, serta berfokus pada penyelesaian masalah secara konstruktif dan efektif. Pendekatan ini membantu dalam mencapai hasil yang lebih baik dalam diskusi dan negosiasi.
- c. Penyediaan solusi dalam mengatasi konflik Penyediaan solusi dalam mengatasi konflik melibatkan serangkaian langkah untuk mengatasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini biasanya dimulai dengan memahami penyebab utama konflik dan perspektif masing-masing pihak. Selanjutnya, berbagai metode seperti komunikasi terbuka, kompromi, mediasi, atau negosiasi digunakan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan, sehingga konflik dapat diatasi dengan cara yang konstruktif dan produktif

Berdasarkan penjelasan diatas menggabungkan pendekatan-pendekatan diharapkan dapat mengurangi dan mengatasi Konflik pemuda secara efektif, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif bagi mereka. Adapun indikator yang digunakan dalam konflik pemuda ini yaitu, meliputi mediasi konflik, Fasilitasi pertemuan pemuda, Pemberian sanksi atau tindakan hukum, Penyediaan solusi atau alternatif penyelesaian.

## B. Penulisan yang Relevan

Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan acuan penulisan yang relevan, dalam hal ini penulis mengangkat penulisan tentang Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda Di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Berikut beberapa penulisan yang relevan:

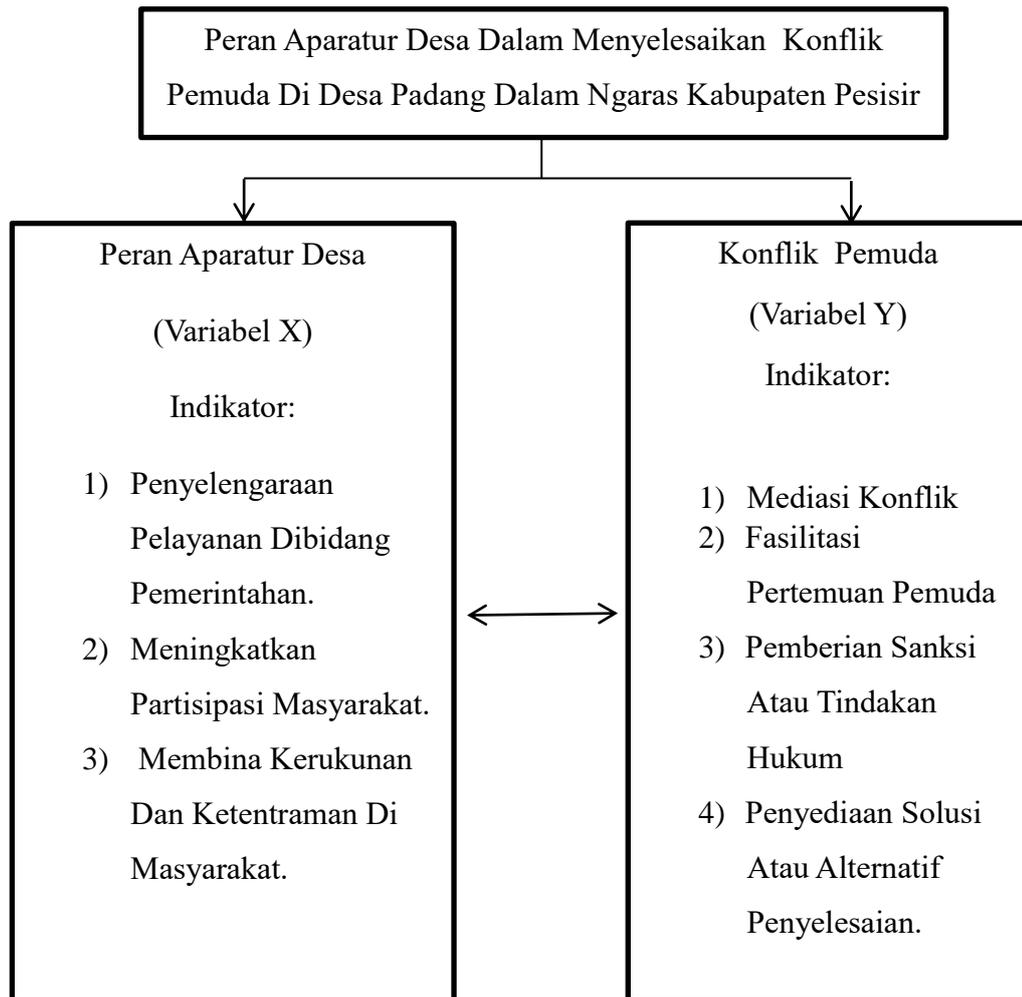
1. Penulisan Rahma aini suci pada tahun 2017 dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Pemuda Menurut Prinsip Siyāsah Qaḍā’iyyah” Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penulisan ini membahas tentang peran lembaga adat ini dalam menyelesaikan Konflik terdapat persamaan variabel y didalam judul penulisan yang dibuat oleh penulis, terdapat Perbedaan dengan penulisan yang akan diteliti oleh penulis terletak pada variabel x, dan variabel X pada penulisan ini adalah Peran Aparatur Desa . Namun, penulisan ini relevan karena memiliki kesamaan ruang lingkup dalam menyelesaikan Konflik pemuda.
2. Penulisan Resaldy om poluan, pada tahun 2023 dengan judul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Yang Terjadi Di Pertambangan Di Desa Moreah Satu Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara” terdapat persamaan variabel x pada penulisan yang dibuat oleh penulis yaitu peran pemerintah desa, terdapat perbedaan tempat dalam neliti, bisa dikatakan relevan karna terdapat kesamaan dalam peran aparaturnya desa dalam mengatasi Konflik/konflik ini.
3. Penulisan Nur Samsiar, pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Sosial Warga Desa Pesaku Dan Warga Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi” terdapat persamaan variabel x di judul yang dibuat penulis, dan terdapat perbedaan tempat, bisa dikatakan terikat karna sama-sama membahas cara mengatasi konflik/masalah yang ada tetapi berbeda ruang lingkup yang diteliti.

### C. Kerangka Berpikir

Penulisan ini nantinya akan mencari tahu tentang peran aparaturnya dalam menyelesaikan Konflik, Konflik ini merupakan suatu perselisihan, perbedaan atau pertentangan paham dan sebagainya, pertengkaran dan percekocokan, yang bisa berkonsekuensi kepada tindakan perkelahian, pemukulan, pelukaan dan penganiayaan. Konflik pemuda sudah sering terjadi di negara Indonesia, dan tak bisa dipungkiri juga ternyata Konflik pemuda ini sering terjadi di desa padang dalam sehingga Konflik ini harus dihindari karena dapat memunculkan konflik dan perang antar pemuda.

Dalam penanganan petikaian di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dibutuhkan peran dari Aparatur Desa dalam penyelesaian Konflik di masyarakat Pesisir Barat. Mereka berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, memastikan bahwa Konflik/konflik diselesaikan secara damai dan adil.

Berdasarkan penjelasan tersebut terkait, maka membuat penulis ingin mengetahui peran aparaturnya dalam menyelesaikan konflik pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat, indikator yang digunakan dalam Aparatur (Variabel X) yaitu peran aparaturnya dalam menciptakan kerukunan dalam masyarakatnya Sedangkan Konflik pemuda (Variabel Y) di paparkan diatas, maka dapat penulis gambarkan sebagaimana skema di bawah ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penulisan**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir dari permasalahan di atas, maka ditentukan hipotesis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Ho : Tidak Adanya Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda Di Di Desa Padang Dalam.
2. Hi : Adanya Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda Di Desa Padang Dalam.

### **III. METODOLOGI PENULISAN**

#### **A. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yaitu: “Metode penulisan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penulisan, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Adapun tujuan dari penulisan deskriptif adalah untuk membuat sebuah deskripsi, gambaran atau sebuah lukisan secara sistematis, faktual yang akurat mengenai fakta- fakta atau sifat yang berhubungan dengan fenomena yang di selidiki. Sebagaimana penulisan ini dilakukan untuk mengetahui peran aparatur desa terhadap penyelesaian konflik pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2017) pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah seluruh pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat yang menurut data yang didapat pada saat pra penulisan kepala desa menyampaikan terdapat pemuda yang ada di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat. Dengan mengacu usia pemuda berdasarkan Rancangan Undang-Undang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode

penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Berikut ini tabelnya:

**Tabel 3.1 Tabel Usia Pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat 2024**

<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Pemuda laki-laki</b>	<b>Jumlah Pemuda perempuan</b>
1.	50	36
2.	35	44
3.	68	59
<b>Total</b>	<b>153</b>	<b>139</b>

*Sumber Data: Operator Desa Padang Dalam*

Berdasarkan tabel di atas, maka populasi dalam penulisan ini adalah sebanyak 292 pemuda yang ada di desa padang dalam tahun 2024.

## 2. Sampel

Sugiyono (2008), mendefinisikan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Selanjutnya menurut arikunto (2006), mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penulisannya merupakan penulisan populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10% - 15 % atau 20% - 25% atau lebih (Arikunto,2019).

Dalam penulisan ini, populasi terdiri dari tiga pemangku yakni dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Maka, dalam penulisan ini penarikan sampel menggunakan teknik *random sampling* (Sukardi, 2008). Semua pemangku akan mendapatkan perlakuan yang sama. Untuk mewakili setiap dusun maka sampel penulisan ini berjumlah 74 yang terdiri dari 3 dusun di Desa Padang Dalam.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka penulisan ini sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi yang ada, serta diitung dengan menggunakan Taro Yamane sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2+1}$$

Keterangan :

$n$  : Jumlah Sampel

$N$ : Jumlah Populasi

$d^2$  : presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel (ditetapkan 10%)

$$n = \frac{292}{292 \times 0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{292}{292 \times 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{292}{2,92 + 1}$$

$$n = \frac{292}{3,92} = 74,48 = 74$$

(Riduan Dakdon, 2009)

Perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel sebanyak 74 responden. Kemudian Penarikan sampel dalam penulisan ini menggunakan *teknik random sampling*, dengan demikian, penulis memberi hak yang sama kepada setiap pemangku untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Adapun untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkatan digunakan rumus *stratified random sampling* lebih jelasnya sampel pada penulisan ini dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \cdot n$$

Keterangan :

$n_i$  = Jumlah sampel menurut stratum

$N$  = Jumlah sampel seluruhnya

$N_i$  = Jumlah populasi secara stratum

$N$  = Jumlah populasi seluruhnya.

Sehingga didapatkan jumlah sampel berdasarkan rumus tersebut dipaparkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 Jumlah Pemuda Yang Menjadi Sampel Berdasarkan Per Dusun**

Dusun	Jumlah Pemuda laki-laki dan perempuan	Perhitungan Sample	Sample
1.	86	$\frac{86 \times 74}{292}$	22
2.	79	$\frac{79 \times 74}{292}$	20
3.	127	$\frac{127 \times 74}{292}$	32
<b>Total</b>	<b>292</b>		<b>74</b>

Sumber: Data Primer (2024)

### C. Variabel Penulisan

Sugiyono (2017) berpendapat bahwa Variabel Penulisan merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, sebuah objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh seorang penulis untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan adalah Variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

#### 1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel terikat, sementara variabel bebas berada pada posisi yang lepas dari variabel terikat. Variabel bebas (X) dalam penulisan ini ialah peran aparatur desa.

#### 2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengaruh variabel bebas. Variabel terikat (Y) pada penulisan ini adalah dalam menyelesaikan Konflik pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat.

## **D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel**

### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual variabel digunakan guna menegaskan tentang masalah yang akan diteliti. Definisi konseptual merupakan penegasan serta penjelasan suatu konsep dengan menggunakan konsep atau kata-kata kembali, yang tidak diharuskan untuk menunjukkan dimensi pengukuran tanpa menunjukkan deskripsi, indikator, dan tentang bagaimana cara mengukurnya. Beberapa aspek yang perlu di konsepskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Aparatur Desa: Aparatur desa merujuk pada perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya yang bertanggung jawab atas administrasi dan pelayanan di desa. Peran mereka dalam penulisan ini mencakup fungsi-fungsi seperti mediasi, fasilitasi, dan penyelesaian masalah dalam masyarakat, khususnya dalam mengatasi Konflik pemuda.
- 2) Konflik Pemuda: Konflik pemuda merujuk pada konflik, perselisihan, atau ketegangan yang terjadi di antara anggota kelompok pemuda dalam komunitas. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan masalah sosial lainnya.

### **2. Definisi Operasional**

Menurut Sarwono (2006:27) definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Aparatur Desa:  
Indikator: Meliputi mediasi konflik, fasilitasi pertemuan pemuda, pemberian sanksi atau tindakan hukum, dan penyediaan solusi atau alternatif penyelesaian.

Pengukuran: Dapat diukur melalui kuesioner yang berisi pertanyaan tentang frekuensi, efektivitas, dan persepsi masyarakat terhadap tindakan aparaturnya dalam menangani Konflik pemuda.

Pengukuran juga dapat mencakup wawancara dengan tokoh masyarakat atau aparaturnya.

## 2) Konflik Pemuda:

Indikator: Jumlah kejadian konflik, jenis konflik (fisik, verbal, atau lainnya), dan durasi konflik.

Pengukuran: Diukur melalui laporan atau data dari pos keamanan desa, laporan aparaturnya, serta kuesioner kepada masyarakat dan pemuda mengenai kejadian konflik.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dalam teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data lengkap dan valid yang nanti akan menunjang keberhasilan dalam penulisan ini. Berikut ini penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

### 1. Teknik Pokok (Angket)

Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan dan akan dijawab oleh responden. Dimana responden dalam penulisan ini adalah Pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Angket yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah angket tertutup dengan item-item pertanyaan yang disertai alternatif jawaban, sehingga membantu responden untuk menjawab dengan cepat, dan juga memudahkan bagi penulis dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Angket tertutup merupakan jenis angket dimana pertanyaan-pertanyaan dan opsi jawabannya telah disiapkan sebelumnya, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang paling sesuai dan menandai dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang mereka pilih. Angket digunakan untuk mengumpulkan data pada kedua variabel independen dan dependen. Data yang diperoleh

dengan mengisi kuesioner/angket merupakan data asli dengan skala pengukuran yaitu *skala likert*.

Adapun kriteria penskoran setiap butir berdasarkan penentuan kriteria *skala likert*, Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot berbeda-beda

- a. Untuk alternatif jawaban sangat sering diberi nilai atau skor tiga (3).
- b. Untuk alternatif jawaban kadang-kadang diberi nilai atau skor dua (2).
- c. Untuk alternatif jawaban tidak pernah diberi nilai atau skor satu (1).

## **2. Teknik Penunjang**

### **a. Wawancara**

Wawancara telah dilakukan oleh penulis dalam rangka melakukan studi pendahuluan untuk menemukan letak permasalahan yang harus diteliti. Wawancara berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara telah dilakukan kepada kepala desa dan aparatur desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat (dengan tatap muka). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika penulis akan melakukan wawancara kembali untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jika wawancara yang dilakukan dalam penulisan ini adalah wawancara terpimpin, dimana pihak yang mewawancarai yaitu penulis sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Adapun tujuan wawancara ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data penulisan yang belum lengkap. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk melihat bagaimana peran aparatur desa dalam menyelesaikan Konflik pemuda di desa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat.

## **F. Instrumen Penulisan**

Instrumen penulisan adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen penulisan juga merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya mengumpulkan data (Hamni, 2016).

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penulisan merupakan alat bantu yang dapat digunakan oleh penulis untuk membantu mengumpulkan dan mengukur informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti.

Adapun instrumen penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Lembar Angket**

Lembar Angket ini adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006). Penulis menggunakan angket tertutup berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang mereka inginkan.

### **2. Lembar Wawancara**

Lembar wawancara Penulisan ini menggunakan lembar pertanyaan wawancara yang disusun dalam bentuk format khusus dengan aspek-aspek penilaian yang dikembangkan dari indikator. Penilaiannya dilakukan oleh penulis secara langsung menggunakan bantuan lembar kisi-kisi dengan tujuan untuk melihat peran aparaturnya terhadap penyelesaian Konflik Pemuda di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

## **G. Uji Validitas dan Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Validitas adalah sebuah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2011). Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur. Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Berdasarkan uraian tersebut uji validitas dapat diartikan sebagai kontrol langsung terhadap teori- teori yang telah melahirkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi dengan Pembimbing 1 dan Pembimbing II.

Kemudian hasil uji coba angket menunjukkan bahwa variabel Peran Aparatur Desa (X) dan Dalam menyelesaikan Konflik pemuda (Y) dinyatakan valid. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variable penulisan. Penulis ini memiliki dua variabel yaitu Peran Aparatur Desa (X) dan Dalam Menyelesaikan Konflik pemuda didesa padang dalam ngaras kabupaten pesisir barat (Y). Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing- masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi *pearson product moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Koefesien korelasi pearson validitas

$X$  = Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan

$Y$  = Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan

$N$  = Banyaknya jumlah/subjek responden

(Sujarweni, 2012)

Untuk memudahkan uji validitas dalam penulisan ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Langkah-langkah dalam menghitung validitas menggunakan bantuan SPSS versi 22 yaitu: (1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) Analyze >> Correlate >> Bivariate; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak Variables; (4) Klik Pearson >> OK. Adapun

kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Priyanto, 2008)

- a. Jika  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  maka item dinyatakan valid.
- b. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi:

- a. Jika nilai signifikansi  $> \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi  $< \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument itu sudah baik (Suharsimi Arikunto, 2010: 178).

Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penulisan. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS versi 25. Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan diatas 0.8 adalah baik. Beberapa penulis berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel:

**Tabel 3.3 Indeks Koefisien Reliabilitas**

Nilai Interval	Kriteria
$<0,20$	Sangat Rendah
$0,20 - 0,399$	Rendah
$0,40 - 0,599$	Cukup
$0,60 - 0,799$	Tinggi
$0,80 - 1,00$	Sangat Tinggi

(Sumber Data: Wibowo (2012))

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai *r* tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan  $df = N - k$ ,  $df = N - 2$ ,  $N$  adalah banyaknya sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012:52)

- a. Jika  $r$  hitung ( $r$  alpha)  $>$   $r$  tabel  $df$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika  $r$  hitung ( $r$  alpha)  $<$   $r$  tabel  $df$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis yang dilakukan setelah semua data terkumpul, yaitu dengan mengidentifikasi data selanjutnya mengolah data tersebut. Adapun dalam penggolongan data tersebut menggunakan rumus interval, yakni:

### 1. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket (Peran Aparatur Desa) dan angket (Menyelesaikan Konflik Pemuda). Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta persentase tingkat Peran Aparatur Desa dan tingkat Penyelesaian Konflik Pemuda. Analisis distribusi frekuensi menggunakan rumus interval yang dikemukakan oleh Hadi (1986) dengan persamaan berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus presentase sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

P = Besarnya persentase

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria yang ditafsirkan sebagai berikut:

76% - 100 % = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang baik

0% - 39% = Tidak baik

(Suharsimi Arikunto, 2010: 196).

## 2. Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis ini dilakukan karena analisisnya menggunakan statistik parametris, maka harus dilakukan pengujian persyaratan analisis terhadap asumsi dasar seperti normalitas dan linieritas untuk uji korelasi dan regresi. Pada penulisan ini menggunakan uji prasyarat normalitas dan linieritas karena analisis akhir dari penulisan ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier sederhana.

### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data penulisan yang digunakan terdistribusi dengan normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan SPSS 25 untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Uji yang digunakan adalah uji *Kolmogorov Smirnov*. Berikut rumus uji *Kolmogorov smirnov*:

$$D = |F_s(x) - F_t(x)|_{max}$$

Keterangan

$F_s(x)$  = Distribusi frekuensi kumulatif sampel

$F_t(x)$  = Distribusi frekuensi kumulatif teoritis

Dasar pengambilan keputusan hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data penulisan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka data penulisan tidak berdistribusi normal.

### 2) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah Peran Aparatur desa (variabel X) dan dalam menyelesaikan Konflik (variabel Y) memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Uji linearitas dilakukan menggunakan SPSS 25 untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Uji yang digunakan adalah uji F dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{reg} = \frac{RK_{reg}}{RK_{res}}$$

Keterangan :

$F_{reg}$  = Harga bilangan F untuk garis regresi

$RK_{reg}$  = Rerata kuadrat garis regresi

$RK_{res}$  = Rerata kuadran residu

(Sutrisno Hadi, 2014)

Dasar pengambilan keputusan hasil uji linearitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig. > 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.
- b. Jika nilai Sig. < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y.

### 3. Analisis Data

#### a. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari Peran Aparatur Desa (X) sebagai variabel bebas (menyelesaikan konflik Pemuda) sebagai variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25 berdasarkan hasil uji analisis regresi linear sederhana untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0,05, maka ada Peran Aparatur Desa (X) dalam menyelesaikan Konflik Pemuda (Y).
- b) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05, maka tidak ada Peran Aparatur Desa (X) dalam menyelesaikan Konflik Pemuda (Y).

Selanjutnya menguji hipotesis yaitu menggunakan uji regresi linearitas sederhana dengan bantuan SPSS versi 25 sebagai berikut:

#### **b. Uji Regresi Sederhana**

Sederhana Selanjutnya dalam penulisan ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penulisan ini menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan ketentuan apabila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  pada taraf 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier.

Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat peran antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu Peran Aparatur desa (X) dalam menyelesaikan Konflik pemuda(Y). Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

Y : Subyek pada variabel dependent

X : Prediktor

a: Harga Y ketika harga X = 0 (Harga Konstanta)

b : Koefisien regresi

(Sugiyono, 2019).

#### **c. Uji Koefisien Determinasi**

Menurut Ghozali (2011) Uji koefisien determinasi (R) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel- 55 variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R dimana untuk menginterpretasikan besarnya nilai koefisien determinasi harus diubah kedalam bentuk persentase.

Sisa dari total (100%) yang artinya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penulisan. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah  $0 < R^2 < 1$ . Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel X terhadap Y dan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = (r^2) \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Nilai Koefisien Determinasi

R = Nilai Koefisien Korelasi

(Riduwan, 2009)

#### 3.4 Tabel Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi

Interval Koefisien	Tingkat Peran
0% - 19,9	Sangat lemah
20% - 39,9%	Lemah
40% - 59,9%	Sedang
60% - 79,9%	Kuat
80% - 100%	Sangat kuat

Sumber Data : Sugiyono, (2010)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pengujian yang telah penulis lakukan mengenai Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda Di Desa Padang Dalam Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, terdapat peran signifikan dari aparaturnya (variabel X) terhadap konflik pemuda (variabel Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis koefisien determinasi variabel x terhadap variabel y yang mengartikan terdapat peran sebesar 55,4% dan 44,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kedekatan dengan masyarakat, kecepatan tanggap terhadap masalah serta pemahaman adat dan norma.

Hasil analisis tersebut juga didukung oleh angket dan wawancara yang dilakukan penulis kepada pemuda di desa padang dalam yang mendapatkan hasil pengujian hipotesis penulisan terdapat Peran Aparatur Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pemuda. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil angket dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan pemuda di desa padang dalam yang menunjukkan adanya peran aparaturnya dalam menyelesaikan konflik pemuda di desa padang ngaras kabupaten bearti bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak dan Hipotesis  $H_1$  diterima.

Melalui penjelasan di atas diketahui bahwasanya dari permasalahan konflik pemuda yang ada di desa padang dalam ini tentunya diperlukan adanya suatu peran aparaturnya untuk menyelesaikannya, sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan baik dengan adanya peran aparaturnya ini.

## Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Aparatur Desa

Bagi aparatur desa hendaknya mengadakan dialog terbuka yang bertujuan menciptakan ruang aman untuk pemuda berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Adakan pertemuan rutin yang bisa bersifat informal, sehingga pemuda merasa lebih nyaman untuk berbagi pandangan dan perasaan mereka. Ini dapat membangun kepercayaan antara aparatur desa dan pemuda.

### 2. Bagi Pemuda

Bagi pemuda hendaknya melakukan komunikasi secara terbuka dimana penting bagi pemuda untuk mengedepankan komunikasi yang jujur dan terbuka dengan rekan-rekan mereka. Jika ada perbedaan pendapat, bicarakan secara langsung untuk memahami sudut pandang masing-masing. Jangan ragu untuk mengajak teman berdiskusi atau mendengarkan keluhan mereka, sehingga dapat menemukan solusi bersama.

### 3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hendaknya perlu membangun sistem dukungan bagi pemuda, di mana mereka merasa dihargai dan didengar. Lingkungan yang positif dapat mencegah konflik sebelum terjadi. Selenggarakan acara atau forum diskusi yang melibatkan pemuda, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu yang relevan.

### 4. Bagi Penulis Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan selanjutnya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan konflik pemuda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A. Y. 2015. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan SDA di Hutan Sesaot, Lombok Barat. *Sodality, Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(03), 91–100.
- Adnan, Gunawan. *Sosiologi agama: memahami teori dan pendekatan*. Ar-raniry Press, 2020.
- Ahmad, I. 2012. Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa. *Jurnal Legalitas*, 5(01).
- Ahmad, K., & Ongki, O. 2020. Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. CIVICUS: Pendidikan-Penulisan-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 58-68.
- Alfian, Y. 2019. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 43-60.
- Arifin, B., Abrori, M., & Masruroh, D. 2024. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(01), 43-53.
- Arifin, Z., Mutiari, Y. L., Irsan, I., & Ramadhan, M. S. 2020. Peran Perangkat Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Constitution. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 160-175.
- Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka. CIVICUS: Pendidikan-Penulisan-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
- Arif, Alma, *Manajemen Konflik Sosial di Indonesia, Jurnal Pemerintahan* Vol. 1, No. 1, 2014.
- Ali M. Amin Syamsuddin Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial . *Jurnal Common* Vol. 1 No.2 Desember 2017.

Annan A. Kofi, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, Jakarta: AMEPRO, 2019.

Azifah Azifatil, *Konflik Dan Kekerasan Studi Kasus Tawuran Antar Warga Di Kelurahan Bunga Ejayya Beru Dengan Kelurahan Barayya Kota Makassar*, (Makassar, Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negri (Uin) Alauddin Makassar, 2019.

Dewi, A., Hidayat, R., Widhagdha, M. F., & Purwanto, W. 2020. Dinamika Komunikasi dalam Resolusi Konflik Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 33–38.

Dewi, Susi Fitria, et al. "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal: Masyarakat Adat Miangkabau dan Ammatoa Kajang." 2022: 1-129.

Eri, M. 2023. *Pembangunan Rumah Ibadah dan Kerukunan Umat Beragama di Gayo Lues (Suatu Pendekatan Sosiologi Agama)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Hermawan, A. 2017. \*Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat\*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Halim, A., & Abdullah, S. 2020. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.

Irna, I., Wijaya, M. S., Marian, S., & Wenda, B. 2024. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1).

Iskandar, A. H. 2020. *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Iswahyudi, M. S., Iskandar Zulkarnain, S. E., Hamidah Rosidanti Susilatun, M. E. M., Robial, F. E. D., Hendry Rumengan, M. M., Ch, D., Wangania, I., Mei Hastuti, S. E., Sugiharti, S. E., & Purnomo, K. D. M. 2023. *Pengantar Manajemen Konflik*. Cendikia Mulia Mandiri.

Jalil, M. 2019. Strategi komunikasi tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah di desa pasir belengkong kecamatan pasir belengkong kabupaten paser. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 2(4), 15–29.

Juru, N. A., & Gorda, E. S. 2021. Analisis struktur organisasi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Buleleng. *Perspektif*, 10(1), 239-247.

- Maku, D., & Pariono, A. 2020. Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Obyek Wisata Pantai Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. *Publik*, 5(2), 78-86
- Murni, M. 2018. Manajemen Konflik Dalam Pendidikan. *Intelektualita*, 4(1).
- Munajat, Enas, et al. "Peran Kepala Desa Terhadap Perilaku Menyimpang Dikalangan Pemuda Desa Kolelet Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* 1.11 2022: 2271-2280.
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. 2019. Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 70-78.
- Nurdin, A. 2017. Revitalisasi kearifan lokal di Aceh: Peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 135-154.
- Nurmalisa, Y., & Adha, M. M. 2019. Peran lembaga sosial terhadap pembinaan moral Pemuda di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 64-71.
- Prayitno, Gunawan, and Aris Subagiyo. *Membangun desa: Merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Putri, Arzika, Dinda Maqfirah, and Ramadhan Fitria. "Peran Kuliah Pengabdian Masyarakat (Kpm) dalam Mengembangkan Sistem Informasi Gampong (Studi di Desa Lamsiteh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 4.2 (2024): 92-105.
- Rahawarin, Y. 2018. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63).
- Ramadani, N. S., Pitoewas, B., & Halim, A. 2024. Pengaruh Globalisasi terhadap Pemahaman Nilai Sila Kedua di Kalangan Generasi Muda. *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, 3(3), 29-35.
- Sagitarini, Yuliana, et al. "Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9.1 2022: 73-88.
- Saiful, T. 2020. Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh. *Doctrinal*, 2(2), 491-508.

- Susetyo, D. P. B. 2021. *Jurnal Dinamika Kelompok: Pendekatan Psikologi Sosial*. SCU Knowledge Media.
- Sugiyono. 2019. *Jurnal Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Jurnal Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *jurnal Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta
- Tanyid, M. 2018. Kualitas Pemimpin Sebagai Pendidik Dalam Menghadapi Konflik. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(1), 124–137.
- Wahyudi, H. 2018. *Kepemimpinan dan Konflik dalam Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wiranta, A., & Rendi, A. W. 2022. Manajemen Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Sepapan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *Aslamiah: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 2(2), 129-146.